

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti melihat hasil penelitian terdahulu berupa tesis yang disusun oleh Haryo Limanseto (Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 2000) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Arus Barang Impor: Studi Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Jakarta”.⁷

Pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci dalam tiga sub-pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan sistem EDI Kepabeanan dalam lalu lintas arus barang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Jakarta, pengaruh atau hasil dari sistem EDI Kepabeanan terhadap arus pelayanan barang impor pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Jakarta, dan bagaimana upaya meningkatkan pelayanan dengan sistem EDI Kepabeanan itu sendiri. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai pelayanan arus barang impor yang terbaik melalui sistem EDI Kepabeanan.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat analisis statistik inferensial terhadap indikator-indikator Sistem EDI Kepabeanan dan Pelayanan Arus Barang Impor. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Populasinya adalah Pegawai dan Masyarakat Usaha Kepabeanan. Sampel diambil secara random dengan berpedoman pada Tabel Krejcie. Melalui telaah dokumen, kuesioner, wawancara sebagai instrumen penelitian, data hasil penelitian yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem EDI Kepabeanan, kuat lemah pengaruhnya melalui

⁷ Haryo Limanseto, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Arus Barang Impor: Studi Pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Jakarta*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), tidak dipublikasikan

perhitungan *Contingency Coefficient*, dan selanjutnya diinterpretasi serta dikaji secara mendalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok III Jakarta ditunjuk secara penuh menerapkan sistem EDI Kepabeanan mengingat tingginya volume lalu lintas impor pada kantor tersebut, perannya yang penting penerimaan negara dan demikian tinggi pula resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang kepabeanan. Tesis ini juga menyimpulkan peningkatan kualitas pelayanan arus barang impor dapat dilakukan dengan mengatasi kesenjangan-kesenjangan (*gap*) atau perbedaan persepsi antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan oleh pelanggan.

Dari hasil penelitian yang telah dibaca tersebut, peneliti belum menemukan penelitian yang menjelaskan mengenai analisis kemungkinan penerapan sistem *National Single Window* di Indonesia seperti yang akan diteliti dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari metode penelitian di atas, yakni menggunakan pendekatan kualitatif.

2.2 Tinjauan Literatur

2.2.1 Pelayanan Publik

Pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.⁸ Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang ataupun jasa. Hasil pelayanan berupa jasa tidak dapat diinventarisasi, tidak dapat ditumpuk atau digudangkan, melainkan hasil tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Dalam hal pelayanan diberikan dengan tidak optimal, maka pelayanan tidak dapat diulangi, karena pelayanan diberikan secara langsung kepada pelanggan. Sedangkan pelayanan umum terkait dengan tugas aparatur pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD.⁹

⁸ Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal 60-61

⁹ *Ibid*

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.¹⁰ Yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut Boediono adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (*profit*).¹¹ Menurut Kurniawan, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.¹²

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus mengandung sendi-sendi: kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.¹³

Dengan memperhatikan sendi-sendi tersebut, maka dapat memilih untuk menggunakan salah satu pola di bawah ini sesuai dengan bentuk dan sifat pelayanan umum yang diselenggarakan. Pola-pola dimaksud adalah:

a. Pelayanan Fungsional

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, suatu instansi pemerintah dapat memilih pola pelayanan fungsional. Misalnya pelayanan Kewidyaiswaraan yang memberikan pelayanan umum kepada setiap pengguna jasa Widyaiswara dalam penyelenggaraan diklat-diklat, dari penyusunan kurikulum sampai pada penyelenggaraan pembelajaran

b. Pelayanan Satu Atap

Pola pelayanan umum yang dilakukan secara terpadu pada satu tempat atau lokasi oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Seperti yang dilakukan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan,

¹⁰ AG. Subarsono, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. Agus Dwiyanto, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hal 136

¹¹ Boediono, *Op.Cit*, hal 59

¹² Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaruan, 2005) hal.1-2

¹³ *Ibid*, hal 68

dan Polri yang membentuk pelayanan satu atap bagi pelanggan pemilik kendaraan bermotor

c. Pelayanan Satu Pintu

Pola pelayanan satu pintu di sini dimaksudkan pemberian pelayanan umum secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya

d. Pelayanan Secara Terpusat

Pola pelayanan secara terpusat adalah pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan

e. Pelayanan Satu Tempat

Pola pelayanan satu tempat adalah pola pelayanan umum yang dilakukan oleh satu unit yang mengkoordinir beberapa unit pelayanan dalam satu instansi pemerintah. Pola pelayanan satu tempat ini dilaksanakan oleh setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) di seluruh Indonesia.¹⁴

2.2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir karena unsur subyektif dari pemegang kekuasaan dan selera biasa dari para pengambil keputusan.¹⁵ Karena tidak semua tuntutan dapat dipenuhi dalam waktu yang bersamaan, terutama disebabkan oleh jumlah dan kualitas sumber daya yang lebih sedikit dibanding tuntutan itu, maka pemerintah selalu melakukan penyaringan dan pemilihan tuntutan atau kepentingan. Ada tuntutan yang dapat dipenuhi segera, tapi tak sedikit yang

¹⁴ *Ibid*, hal 70-75

¹⁵ Didik J. Rachbini, *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999) hal 10

harus ditunda atau disingkirkan. Hasil penyaringan dan pemilihan inilah yang terumuskan sebagai kebijakan publik.¹⁶

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.¹⁷

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif.¹⁸

Kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat populer disebut regulasi. Misalnya perundang-undangan tentang pendidikan, perkawinan, dan lalu lintas. Sementara itu kebijakan yang mengatur pembagian sumber daya disebut kebijakan alokatif, misalnya perundang-undangan tentang anggaran, perpajakan, dan perusahaan negara.

Suatu kebijakan dapat bersifat distributif maupun redistributif. Kebijakan tentang impor barang misalnya, merupakan regulasi yang bersifat distributif karena pemerintah memberikan kesempatan mengimpor kepada pengusaha tertentu yang berarti menghilangkan kesempatan pengusaha lain. Peraturan tentang perpajakan adalah kebijakan alokatif yang bersifat redistributif.

¹⁶ Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo, Agus Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) hal 1

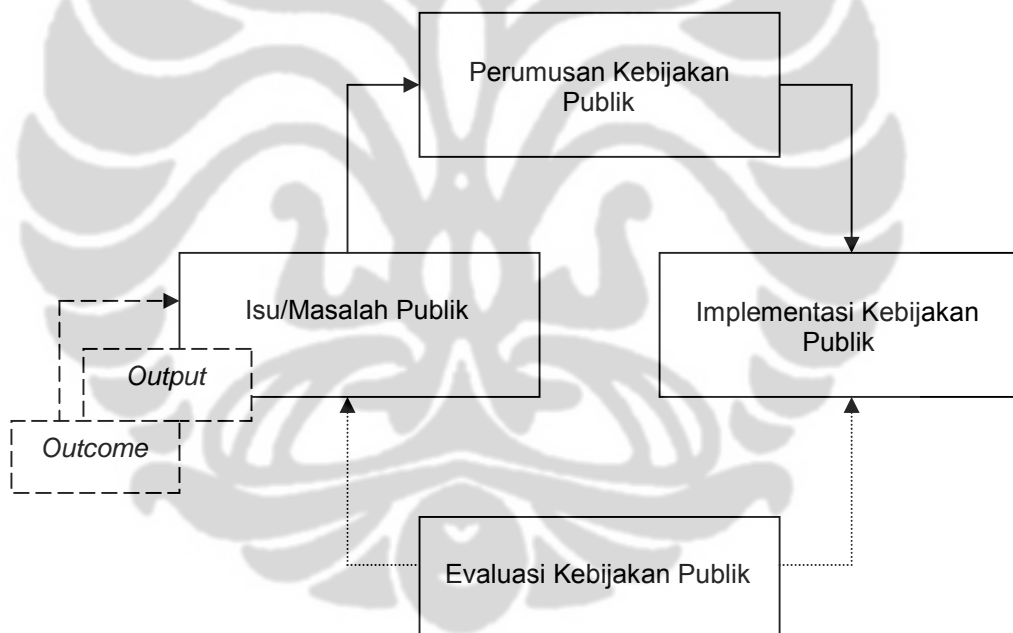
¹⁷ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal 2

¹⁸ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003) hal 60

Ringkasnya, guna mencapai tujuan kebijakan, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan pengelolaan sumber daya tersebut. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua secara terbatas dapat disebut sebagai proses (implementasi) kebijakan.¹⁹

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.²⁰ Isi kebijakan mencakup: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; dan (6) sumber daya yang dikerahkan.²¹

Berikut adalah siklus skematik dari kebijakan publik menurut Nugroho:²²



Gambar 2.1 Siklus Skematik Kebijakan Publik

Sumber: Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, 2003

¹⁹ Samodra Wibawa, *Op.Cit*, hal 4

²⁰ *Ibid*, hal 15

²¹ *Ibid*, hal 22

²² Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003) hal 73

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang, atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya-termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan, baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.²³

Dengan melihat skema tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan

²³ *Ibid*, hal 73-74

3. Evaluasi Kebijakan²⁴

Menurut Howlett dan Ramesh, tahap-tahap siklus kebijakan dan kaitannya dengan pemecahan masalah digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Lima Tahap Siklus Kebijakan dan Hubungannya Dengan Pemecahan Masalah

Pemecahan Masalah	Tahap Dalam Siklus Kebijakan
1. Pengenalan masalah	1. <i>Agenda-Setting</i>
2. Pengusulan solusi	2. Formulasi kebijakan
3. Pemilihan solusi	3. Pengambilan keputusan
4. Menjalankan solusi yang dipilih	4. Implementasi kebijakan
5. Memonitoring hasil	5. Evaluasi kebijakan

Sumber: Howlett dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 2003

Dalam model ini *agenda-setting* merujuk pada proses yang menjadi perhatian pemerintah; formulasi kebijakan merujuk bagaimana pemilihan kebijakan diformulasikan oleh pemerintah; pengambilan keputusan adalah proses yang disetujui pemerintah; implementasi kebijakan berhubungan dengan menjalankan solusi yang sudah dipilih; dan evaluasi kebijakan berhubungan dengan pengawasan hasil kebijakan.²⁵

2.2.3 Sistem Elektronik

2.2.3.1 Komputer

Pengertian komputer menurut Lechner adalah “*a computer is simply a mechanical or electrical apparatus capable of*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Michael Howlett dan M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, (Canada: Oxford University Press, 2003) hal 13

*processing data at high speeds.*²⁶ (komputer adalah peralatan mekanik atau elektronik yang simpel yang mampu untuk memproses data dengan kecepatan tinggi). Menurut Amsyah, komputer adalah suatu alat elektronik yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang diperlukan,²⁷ sedangkan pengertian komputer menurut Sanders adalah:

*“a fast and accurate electronic symbol (or data) manipulating system that’s designed and organized to automatically accept and store input data, process them, and produce output results under the direction of a detailed step-by-step stored programs of instructions.”*²⁸

Maksudnya adalah sistem elektronik yang cepat dan akurat yang didesain dan diorganisasikan untuk menerima dan mengolah data masukan secara otomatis, kemudian memprosesnya dan mengeluarkan output berdasarkan instruksi program-program yang sudah dirancang secara detail.

Komputer melaksanakan pengendalian dengan cara yang sama sekali berbeda. Kadang-kadang ancangan manusia lebih baik, kadang-kadang komputer yang lebih baik.²⁹

Sifat komputer adalah mengikuti perintah. Dalam melaksanakan setiap perhitungan, dalam memberikan setiap butir informasi, terlebih dahulu komputer harus mempunyai perintah-perintah yang disimpan di dalamnya (berupa program komputer) untuk dapat melaksanakan pekerjaan tadi. Komputer akan mengikuti perintah yang telah diberikan dengan kepatuhan. Komputer akan melaksanakannya secara konsisten selama tidak ada kerusakan mekanis.

²⁶ HD. Lechner, *The Computer Chronicles*, (California: Wadsworth, 1984) hal 3

²⁷ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) hal 118

²⁸ Donald H. Sanders, *Computers Today*, (USA: McGraw-Hill Inc, 1985) hal 8

²⁹ Kit Grindley dan John Humble, *Menggunakan Komputer Secara Efektif*, terj. Andreas S. Adiwardana (Jakarta: PT. Pustakan Binaman Pressindo, 1985) hal 37-38

2.2.3.2 Sistem Operasi

Menurut Weinberg dan Geller, sistem operasi adalah “*a collection of programs that manages all of the computer`s resources, acting as an interface between the user and the bare machine.*”³⁰ (kumpulan program yang mengelola sumber daya komputer dan bertindak sebagai penengah antara pengguna dan mesin sederhana).

Pengertian sistem operasi menurut William S. Davis adalah kumpulan dari program penunjang.³¹ Pada program penunjang ini program berganda menciptakan kebutuhan pada program yang melakukan beberapa fungsi-fungsi yang mengatur siapa yang diproses duluan, mengatur memori utama, melakukan proteksi program dan gangguan program lainnya, mengalokasi alat input output, mengatur skedul pekerjaan, melakukan antrian pekerjaan, *spooling*, dan melayani interupsi.

2.2.3.3 Sistem Informasi

Menurut Long, yang dimaksud dengan sistem informasi adalah “*a computer system that merely handles and processes data*”.³² (sebuah sistem komputer yang hanya menangani dan memproses data). Sistem informasi sendiri menurut Verzello dan Reutter memiliki tiga tipe utama, yaitu:

a. Data

Data adalah fakta yang mendeskripsikan suatu kejadian. Data dikomunikasikan dengan simbol yang bervariasi, seperti huruf alphabet, angka, titik dan garis, gambar, dan lainnya. Simbol-simbol ini bisa disusun untuk merepresentasikan fakta dalam kombinasi yang berbeda-beda.

³⁰ Gerald M. Weinberg dan Dennis P. Geller, *Computer Information Systems An Introduction To Data Processing*, (Canada: Little, Brown & Company Ltd, 1985) hal 271-272

³¹ William S. Davis, *Sistem Pengolahan Informasi*, terj. John B. Pasaribu (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1991), hal 326

³² Larry Long, *Introduction To Computers and Information Processing*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1984) hal 310

b. Sistem Pemroses Data

Tipe komponen yang lain dari sebuah sistem informasi adalah sistem pemroses data, yang mengubah data menjadi suatu bentuk yang relevan dan berarti.

c. Saluran komunikasi

Komponen utama yang ketiga dari sebuah sistem informasi adalah saluran komunikasi. Sebuah saluran komunikasi menyalurkan informasi dari sebuah komponen informasi ke komponen informasi lainnya.³³

Beberapa tipe dari sistem informasi menurut Long antara lain:

“can be manual (not automated) or computer-based. It can be function-based or integrated. And, it can be batch or online. In practice, an information system is usually a combination of these elements. A computer-based information system can be either function-based or integrated. A function-based system is designed for and supports a specific application area. In a batch system, transactions and data are collected and grouped (batched) for processing and report generation. In an online system, sometimes called a transaction-oriented system, each transaction is handled and processed as it occurs.”³⁴

Maksudnya bisa berbentuk manual (tidak otomatis) ataupun berbasis komputer. Bisa juga berbasis fungsi, ataupun terintegrasi dan bisa juga dalam bentuk kumpulan ataupun online. Dalam prakteknya, biasanya merupakan kombinasi dari semua elemen tersebut. Sistem informasi yang berbasis komputer bisa berbasis fungsi atau terintegrasi. Sistem yang berbasis fungsi didesain untuk mendukung area aplikasi khusus. Dalam bentuk kumpulan, transaksi dan data dikumpulkan dan dikelompokkan. Dalam sistem online, setiap transaksi diproses sebagaimana terjadinya.

³³ Robert J. Verzello and John Reutter III, *Data Processing Systems and Concepts*, (New York: McGraw-Hill Inc, 1982) hal 25-27

³⁴ *Ibid*, hal 311-315

2.2.3.4 Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI)

Pengertian *Electronic Data Interchange* menurut Paul Dawkins adalah “*the transfer of trading information between organizations and, in particular, between computers within different organizations.*”³⁵ (pengiriman informasi perdagangan antara organisasi dan pada umumnya komputer, dalam organisasi-organisasi yang berbeda).

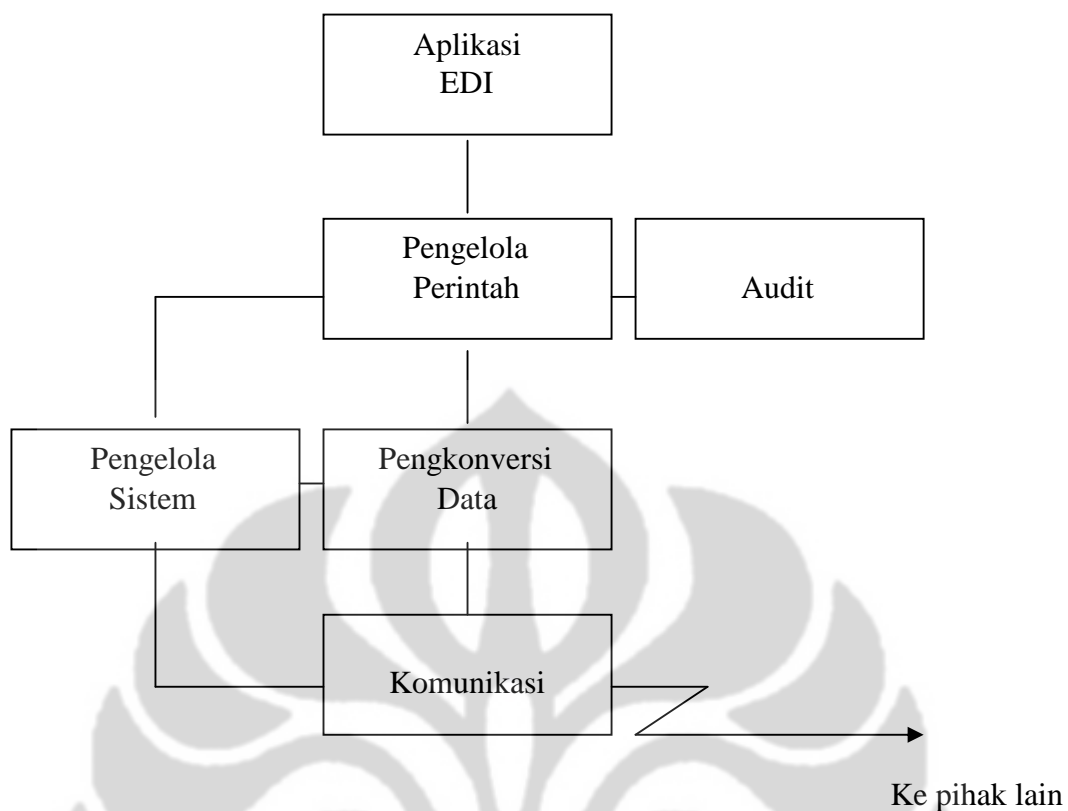
Komponen sistem di dalam EDI terdiri dari:

- a. Komunikasi, yang mengendalikan protokol, pembahasan dengan pihak-pihak yang mengadakan transaksi, ataupun dengan penyedia jasa pelayanan tambahan.
- b. Pengkonversi data, yang mengubah perintah EDI dari format *in-house* ke format standar untuk transmisi, dan sebaliknya. Pengkonversi data ini juga dibutuhkan untuk “membangun” perintah dari form standar dan untuk mengekstrak data dari sebuah perintah.
- c. Manajemen perintah, yang terdiri dari database perintah yang disediakan untuk memproses dan mentransmisikan perintah.
- d. Manajemen sistem, yang memonitor dan mengawasi sistem. Manajemen sistem juga menetapkan data dan format perintah yang dapat diubah, serta dapat juga melaporkan jika terjadi kesalahan/error.
- e. Audit, untuk menyediakan bukti dari perintah yang dikirim dan yang diterima.³⁶

Berikut adalah gambar komponen fungsional dari sistem EDI:

³⁵ Paul Dawkins, *EDI Technology*, ed. Mike Gifkins, (Middlesex: Blenheim Online Publications, 1990) hal 16

³⁶ *Ibid*



Gambar 2.2 Komponen Fungsional dari Sebuah Sistem EDI

Sumber: Paul Dawkins, EDI Technology, 1990

2.2.3.5 Sistem *Single Windows*

Single window adalah sistem yang menerapkan satu dokumen pemberitahuan (*single submission document*), sinkronisasi pemrosesan dokumen (*single ynchronous processing document*), dan satu pembuatan keputusan (*single decision making*) dalam proses administrasi pengeluaran barang (*customs release*).

Penerapan *single window* merupakan kesepakatan kepala-kepala negara ASEAN di Bali tanggal 7 Oktober 2003 yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dalam kesepakatan tersebut dibuat suatu sistem yang terintegrasi dalam upaya menangani kegiatan ekspor/impor. Selain itu juga dalam kesepakatan para Menteri Ekonomi ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 9 Desember

2005 menghasilkan *Agreement to establish and implement the ASEAN Single Window (ASW)*.

Tujuan penerapan ASW adalah untuk mempercepat dan mempermudah alur informasi antara pemerintah dan pelaku usaha, memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, serta menciptakan sistem yang *reliable*, sederhana, standar untuk proses pengeluaran/pemasukan barang (*cargo clearance*) sejalan dengan praktek internasional. Di samping itu juga untuk mengurangi waktu dan biaya yang ditimbulkan dalam proses *cargo clearance*.

Dalam mendukung *Asean Single Window (ASW)*, negara anggota harus membentuk terlebih dahulu Nasional Single Window dalam hal ini *Indonesia National Single Window (INSW)*. Dari tiga model implementasi Single Window yaitu *Single Authority*, *Single Automated System* dan *Automated Information and Transaction System*, INSW menggunakan model yang direkomendasikan oleh ASEAN yaitu *Automated Information and Transaction System*.³⁷

2.2.4 Impor

Pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum.³⁸

Dalam transaksi impor, seorang importir dalam usaha-usaha pemasarannya akan berhubungan dengan instansi-instansi berikut:

- a. *Sole Agent* (agen tunggal barang impor)
- b. *Manufacturer Representative* (perwakilan pabrik yang membuat barang)
- c. *Impor Merchant House* (yang melakukan pembelian barang di luar negeri dan dimasukkan ke dalam negeri untuk dijual kembali)
- d. *Trading House* (badan usaha yang mengumpulkan barang untuk diekspor dan diimpor)

³⁷ Ali Purwito, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Atas Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Kajian Fiskal FH-UI bekerjasama dengan Badan Penerbit FH-UI, 2008) hal 26

³⁸ Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal 50

- e. Bank
- f. *Freight Forwarder*
- g. Asuransi
- h. Bea cukai
- i. Maskapai pelayaran
- j. Surveyor (badan pemeriksa)³⁹

Cara pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit yang diwujudkan dalam berbagai bentuk:

- a. *Advance Payment* (pembayaran di muka)

Dalam sistem pembayaran ini pembeli (importir) membayar di muka (*pay in advance*) kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya.

- b. *Open Account* (pembayaran kemudian)

Belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati.

- c. *Collection Draft* (Wesel Inkasso)

Eksportir atau si penarik wesel (*drawer*) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (*drawee*).

- d. *Consignment* (Konsinyasi)

Yang dimaksud dengan *consignment* (konsinyasi) adalah pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijual oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang tersebut dikumpul dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut dan segera setelah barang-barang

³⁹ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor Impor*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996) hal 3

tersebut terjual maka pembayarannya akan dilakukan kepada eksportir.

e. *Letter of Credit (L/C)*

Dalam penerbitan L/C ini sebuah bank bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam L/C. Dalam transaksi L/C ini bank hanya melihat dan berkepentingan dalam dokumen-dokumen saja dan tidak terlibat dalam barang-barang.

f. Cara pembayaran lain-lain

Cara-cara pembayaran lain yang mungkin dilakukan dalam perdagangan internasional dengan kesepakatan pembeli dan penjual adalah barter, barter konsinyasi, *advance payment* kurang dari 100%, dan pembayaran secara tunai.⁴⁰

2.2.5 Pemberitahuan Pabean

Pemberitahuan merupakan suatu pernyataan atau deklarasi dari orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan kepabeanan tentang penggunaan sarana pengangkut yang mengangkut barang-barangnya dan hal-hal yang terkait dengan importasi/eksportasi, berdasarkan prinsip *self assessment*.

Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk pengiriman data (*transfer*) melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan bongkar barang, sehingga akan merupakan suatu alat bukti yang sah bahwa kewajibannya sudah dilaksanakan. Data elektronik (*soft copy*) merupakan informasi atau rangkaian informasi yang disusun, dikemas, dan dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik optikal atau cara lain yang sejenis.

⁴⁰ *Ibid*, hal 10-15

Melalui sistem aplikasi pelayanan kepabeanan secara elektronik dan untuk pengamanan sistem kepabeanan, perlu dilakukan identifikasi terhadap pengguna jasa yang dapat mengakses atau berhubungan dengan sistem tersebut. Kewajiban pengguna jasa kepabeanan untuk mendaftar bertujuan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat memperoleh data yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengukur besarnya resiko dalam rangka pelayanan kepabeanan.⁴¹

2.2.5.1 Pertukaran Data Elektronik (PDE)

Pemberitahuan pabean disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir bagi kantor-kantor yang belum menerapkan sistem PDE atau dalam bentuk data elektronik. Semua dokumen disampaikan ke Kantor Pelayanan Pabean di pelabuhan tujuan barang atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pelayanan dimaksud, merupakan salah satu pemenuhan kewajiban kepabeanan yang harus dilaksanakan oleh para pengguna jasa. Untuk memproses pemberitahuan dan menjaga agar kelancaran arus barang tidak mengalami hambatan, beberapa Kantor Pelayanan telah menerapkan sistem PDE.⁴²

Perkembangan teknologi menghasilkan teknik penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepabeanan dapat dilakukan melalui elektronik. Dikenal dalam kepabeanan adanya data elektronik (*soft copy*) dimaksudkan sebagai informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim, disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang secara hukum merupakan bukti yang sah. Meskipun data-data tersebut tanpa kertas dan merupakan hasil dari transfer data, namun hasil cetak data dari komputer dapat dijadikan bukti yang sah, baik di kantor pabean maupun pengadilan.⁴³

⁴¹ Ali Purwito, *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu, 2006), hal 150-151

⁴² Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal 25-26

⁴³ *Ibid*, hal 26-27

2.2.5.2 Kewajiban Registrasi

Dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan kepabeanan, diperlukan adanya sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas kewajiban registrasi dalam sistem Pemberitahuan Data Elektronik, bertujuan untuk memastikan orang yang mempunyai otoritas dan hak (biasanya para pengurus perusahaan) yang dapat mengakses dirinya ke jaringan komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Para pemegang otoritas ini diberikan identitas khusus yang disebut sebagai Nomor Identitas Pribadi atau NIP.

Hanya orang tertentu yang berhak atau dapat memasukkan data ke sistem pertukaran data elektronik. Sarana ini sengaja diciptakan untuk mengenali dan melindungi kerahasiaan pengguna jasa kepabeanan yang benar-benar mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat pemberitahuan.⁴⁴

2.3 Kerangka Pemikiran

Potret lalu lintas barang ekspor dan impor pada umumnya terkesan tak beraturan, mulai dari waktu penanganan yang masih terlalu lama, banyaknya biaya-biaya yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), serta tingkat validitas dan akurasi data transaksi yang belum memadai. Dengan adanya pentahapan menuju *ASEAN Economic Community 2020* yang merupakan program *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), masalah-masalah tersebut harus dikikis habis oleh setiap negara anggota ASEAN untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan *ASEAN Single Window*. Tujuan dari penerapan *ASEAN Single Window* adalah untuk mempercepat dan mempermudah alur informasi antara pemerintah dan pelaku usaha dan memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional serta menciptakan sistem yang sederhana dan

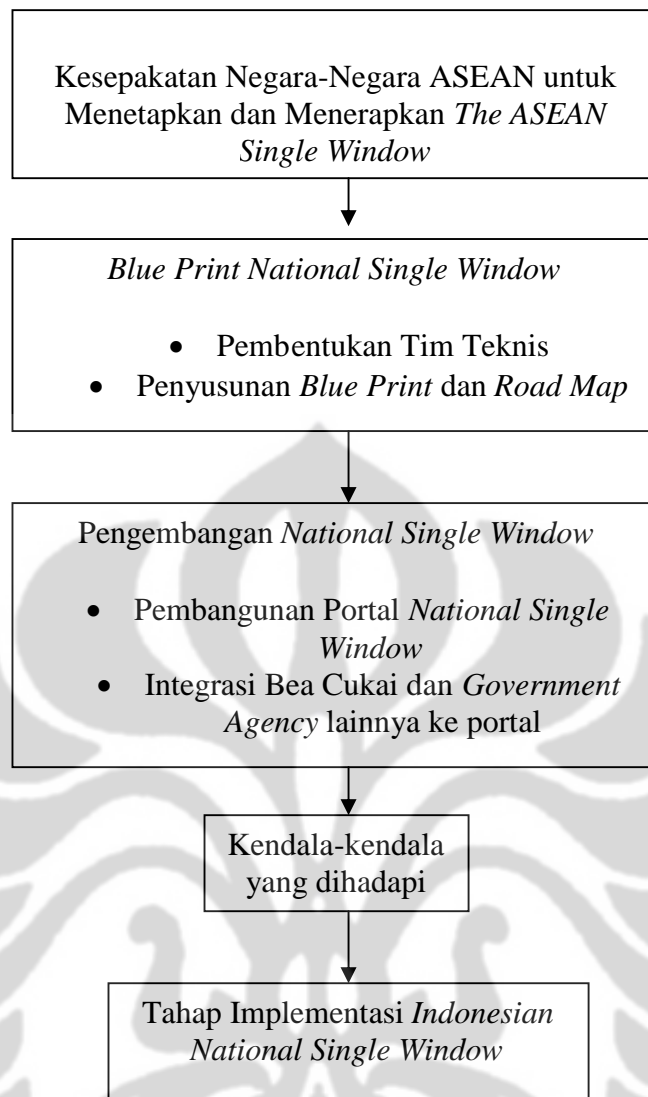
⁴⁴ *Ibid*, hal 28

standar untuk proses *cargo clearance* sejalan dengan praktek internasional. Konsep *ASEAN Single Window* sendiri diturunkan menjadi konsep *National Single Window* pada masing-masing negara anggota ASEAN.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 22/M.EKON/03/2006 Tahun 2006 terakhir diubah dengan KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Pembentukan Tim Persiapan *National Single Window* untuk mulai menyusun *blue print* dan *road map* untuk mulai mengembangkan sistem ini di Indonesia.

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan berupaya untuk menganalisis mengenai persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan oleh Tim Persiapan untuk mengimplementasikan sistem ini di Indonesia dengan waktu yang sedemikian singkat dan juga menganalisis hambatan-hambatan yang dialami sepanjang proses penerapan ini. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan dengan sistem *Single Window* yang diterapkan di Singapura sebagai negara di ASEAN yang sudah menerapkan sistem ini dalam kegiatan perdagangannya. Kemudian semuanya itu akan digunakan untuk menganalisis mengenai kemungkinan untuk menerapkan sistem *National Single Window* ini di Indonesia.

Berikut adalah bagan alur pikirnya:



Gambar 2.3 Bagan Alur Pikir

Sumber: diolah peneliti

2.4 Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁴⁵ Metode penelitian adalah merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.⁴⁶ Dengan demikian, metode penelitian membahas mengenai keseluruhan cara suatu penelitian yang dilakukan, yang mencakup prosedur dan teknik-teknik yang dilakukan di dalam penelitian,

⁴⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal 21

⁴⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992) hal 2

seperti tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan metode pengumpulan data yang dilakukan.

2.4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena tema yang diangkat dalam penelitian ini berusaha mengedepankan penjelasan yang mendalam akan suatu proses hasil tindakan. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁷ Sedangkan menurut Cresswell penelitian kualitatif adalah:

“.... This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting”⁴⁸

Dalam hal ini peneliti tidak melakukan pemeriksaan atas kesesuaian antara fenomena yang sedang diamati dengan teori yang digunakan peneliti, tetapi peneliti mengamati fenomena dan mengambil kesimpulan berdasarkan teori. Peneliti tidak memberikan batasan jawaban kepada informan dalam melakukan wawancara mendalam sehingga informan bisa memberikan jawaban yang bebas.

2.4.2 Jenis/Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian dapat dibedakan menurut tujuan, manfaat, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006) hal 7

⁴⁸ John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (California: SAGE Publications, 1994) hal 1-2

a. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam kelompok penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri (*independent*), baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.⁴⁹ Selain itu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁵⁰ Jenis penelitian deskriptif biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu fenomena baru yang menjadi sorotan masyarakat.

b. Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian murni, karena penelitian tersebut dilakukan atas dasar keingintahuan peneliti terhadap suatu hasil aktivitas yang ada dalam masyarakat.⁵¹

c. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

d. Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik *historical-comparative*. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggabungkan sekaligus teknik penelitian

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2004) hal 11

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hal 6

⁵¹ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hal.29

dengan menggunakan *existing statistics*, dokumen, dan wawancara.

2.4.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Literatur (*Library Research*)

Studi literatur dilakukan oleh peneliti dengan membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian. Tujuan peneliti melakukan studi literatur adalah untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti dan menentukan makna dan hubungan antar variabel yang diteliti. Beberapa sumber kepustakaan yang digunakan oleh peneliti di antaranya adalah melalui referensi buku, undang-undang, majalah, dan data-data sekunder yang berasal dari penelusuran di internet. Data-data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) dengan narasumber yang menggunakan pedoman wawancara. Data berupa teks hasil wawancara dengan narasumber merupakan data primer. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara yang berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan oleh peneliti pada waktu wawancara berlangsung.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan

mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁵² Perkembangan IPTEK menyebabkan definisi wawancara mengalami perubahan dan penyempurnaan. Saat sekarang proses tanya jawab dapat dilaksanakan dalam jarak jauh.

2.4.4 Hipotesis Kerja

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁵³

Hipotesis awal dalam penelitian ini yaitu dalam pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepabeanan, Indonesia menetapkan *Single Administration Document (SAD)*, berbeda dengan Singapura yang belum menerapkan SAD atas dokumen kepabeanannya. Persiapan yang dilakukan antara lain pemerintah sudah membentuk tim teknis untuk mempersiapkan *National Single Window* di Indonesia. Selain itu juga sudah dilakukan beberapa kali sosialisasi mengenai sistem ini kepada para masyarakat usaha pengguna jasa kepabeanan. Kendala yang dihadapi antara lain belum tersedianya infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk menunjang sistem ini.

2.4.5 Narasumber/Informan

Dalam penyusunannya, peneliti menghadirkan beberapa pihak sebagai informan. Pihak-pihak ini dipilih dengan pertimbangan dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil penelitian bisa diambil dengan akurat. Pihak-pihak sebagai narasumber atau informan di antaranya adalah:

- a. Masyarakat pengguna jasa kepabeanan yang menggunakan sistem *National Single Window*, dalam hal ini adalah salah satu perusahaan *freight forwarder*, yaitu dengan Marfy, staf dari divisi impor PT. K Line Air Service yang sering menggunakan

⁵² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press: 2006) hal 88

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 2007, hal.70

sistem *National Single Window* ini. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan sistem *National Single Window* ini.

- b. Pihak pemerintah, dalam hal ini adalah dengan Susiwijono selaku Ketua Pelaksana Tim Persiapan *National Single Window* RI. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui mengenai latar belakang kebijakan penggunaan sistem *National Single Window*.
- c. Praktisi, antara lain adalah Ichwandi selaku Kasubid Pengembangan Informasi dari Departemen Pertanian, Surya selaku staf bidang Data dan Informasi dari Pusat Karantina Ikan, Ani Mulyati selaku Kasubdit Tarif dan Non Tarif Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Diah Hetty Sitomurti selaku Kabid Teknologi Informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Arief Rahman selaku Kasie Layanan Informasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui mengenai persiapan yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang terkait dengan pemberian perijinan dalam proses impor.
- d. Akademisi, yaitu Adang Karyana, seorang widyaiswara dari Pusdiklat Bea dan Cukai. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui relevansi teori dengan pelaksanaan di lapangan.

2.4.6 Proses Penelitian

Awalnya peneliti tertarik dengan gambaran permasalahan yang didapat melalui penelusuran di internet mengenai penerapan sistem *National Single Window* di dalam bidang kepabeanan di Indonesia yang sedang ramai dibicarakan, khususnya di tengah-tengah masyarakat pengguna jasa kepabeanan dimana masih banyak terdapat masyarakat

yang pro dan kontra akan peranan sistem ini di dalam pengurusan dan pelayanan dokumen barang ekspor dan impor.

Setelah itu peneliti memulai untuk menyusun penelitian dengan terlebih dahulu memformulasikan pertanyaan penelitian dalam bentuk satu pertanyaan umum yang kemudian diturunkan ke dalam dua pertanyaan khusus untuk memperjelas penelitian. Selanjutnya peneliti menyusun sistematika penulisan supaya proses penelitian ini bisa lebih terarah dengan baik dan benar. Kemudian peneliti melakukan upaya konfirmasi ke lokasi penelitian setelah mendapatkan surat pengantar untuk melakukan penelitian dari kampus.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan topik penelitian. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang topik penelitian, peneliti mulai menyusun daftar pertanyaan terbuka yang akan diajukan kepada para narasumber/informan untuk melakukan wawancara secara mendalam. Di sini peneliti terlibat sebagai peneliti total, turun ke lokasi penelitian, kemudian mengikuti prosedur perizinan sebagai akses utama memasuki lokasi guna memperoleh data, menemui informan-informan, juga untuk mendapatkan berbagai temuan lapangan lain sebanyak-banyaknya yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalankan.

2.4.7 Site Penelitian

Di dalam penelitian ini *site* penelitiannya tidak hanya terbatas pada satu tempat saja. Dalam penelitian ini *site* penelitiannya antara lain adalah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BPOM, Departemen Perdagangan RI, Badan Karantina Pertanian, dan Pusat Karantina Ikan.

2.4.8 Keterbatasan Penelitian

Penulis dalam mengerjakan penelitian ini mengalami keterbatasan dalam hal waktu yang tidak banyak sehingga dalam proses pengumpulan

data kurang optimal baik dalam pencarian data yaitu melalui buku-buku yang penulis peroleh di perpustakaan, artikel di majalah dan koran, dan lain sebagainya sebagai informasi untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah yang penulis kemukakan. Serta dalam pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, dimana penulis mengalami rumitnya proses birokrasi, selain itu informan sangat sulit untuk ditemui karena kesibukannya. Upaya yang dilakukan penulis untuk mengatasi hal tersebut yakni dengan mengatur waktu pengumpulan data menyesuaikan kondisi dan waktu informan, serta mengajukan pertanyaan sedemikian rupa (secara praktek pada umumnya) sehingga tidak memberatkan informan dalam pemberian informasi dan data. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini hanya terbatas pada implementasi tahap pertama dan persiapan yang dianalisis hanya sebatas persiapan teknis saja.

